

PARADIGMA EKONOMI ISLAM: SEBUAH PENGANTAR

Yuni Prihadi Utomo

PENDAHULUAN

Islam memahami nasib yang agak aneh di tangan pemeluk modernnya. Sementara pakar asing non muslim sering membicarakan islam sebagai sebuah peradaban (*civilization*) yang pernah bangkit dan akan bangkit kembali (baca misalnya Garaudy, 1980 dan Huntington, 1993), para pemeluknya – baik awam maupun cendekiawan – justru sering berupaya menciptakan sekat-sekat bagi lingkup berlakunya Islam. Dalam Konteks ini peradaban secara sederhana dapat diberi definisi sebagai *advanced state of a society possessing historical and cultural unity* kondisi lanjut dari suatu masyarakat yang memiliki kesatuan historis dan kultur (Encarta Encyclopedia, 1997). “Kondisi lanjut dari masyarakat” ini batas-batasnya dengan demikian adalah lebih luas dari hanya sekedar negara. Faka historis mengingatkan kita bahwa masyarakat islam pernah hidup di bawah naungan sistem kekhalifahan yang meliputi wilayah yang sangat luas dengan satu pusat pemerintahan.

Kejelian pakar asing non muslim untuk melihat islam dalam konteks jatuh bangunnya peradaban adalah tidak mengherankan sama sekali,

sebab bila istilah dan hakikat *diemul islam* dipahami secara benar oleh para pemeluknya, niscaya mereka akan selalu berjuang kembali secara militan untuk hidup dalam kesatuan historis dan klutural yang khas. Kebangkitan kembali peradaban islam dengan demikian adalah sebuah keniscayaan, meskipun barangkali akan harus memakan waktu yang cukup lama.

Seperti diuraikan oleh ‘Imarah (1998:xii) dengan merujuk pada *Lisan al ‘Arab* karya Ibnu Mandzur, secara etimologis istilah *ad Din* dalam bahas Arab dipakai untuk memberi empat macam arti. Pertama, mempunyai arti hak untuk menguasai, mendominasi, pemerintah dan menaklukkan. Kedua, memberi arti mirip dengan arti pertama akan tetapi berbeda penekanannya, yaitu patuh, tunduk, pasrah dan merendahkan diri. Ketiga, memberi arti syariah atau rambu-rambu jalan yang harus dipathui, hukum, adat-istiadat dan kebiasaan. Keempat, memberi arti balasan atas perbuatan, pengadilan dan perhitungan neraca amal.

Lebih jauh ‘Imarah (1998, xii) menguraikan bahwa dari analisis leksikografis dan filologis, secara konseptual *ad Dien* adalah kode dan jalan yang telah dijelaskan oleh Allah

yang mencakup ke empat arti literal ad Dien, yaitu siap mengakui kekuasaan Allah sebagai pemegang otoritas mutlak, siap dan pasrah menerima aturan-aturan hukum dan syariah-Nya dan akhirnya menerima dan mengakui bahwa hanya Allah-lah satu-satunya hakim kelak di hari pengadilan. Al Qur'an sendiri menggunakan terma ad Dien untuk menegaskan pengertian komprehensif yang menunjukkan satu keutuhan sistem hidup yang harus dipegang dalam kehidupan manusia masa dan tempat. Dalam al Qur'an istilah ad Dien juga menunjukkan suatu kemapanan sistem pemikiran, ekonomi, politik, sosial dan moral yang dengan demikian mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti misal terlihat dalam ayat berikut:

Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian mengeluarkan piala raja itu dai karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki: dan diatas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui (QS. Yusuf, 12:76).

Kata *ad Dien* - bentuk ma'rifah dengan artikel *al-* dalam bahasa Arab menunjukkan jalan hidup tertentu, al Islam. Sedangkan kata *Dien* - bentuk

nakirah tanpa artikel *al-* menunjukkan satu sistem agama, aturan, atau pemikiran tertentu. Oleh karenanya istilah *ad Dien* dan *al-Islam* digunakan dalam satu pengertian, yaitu agama abadi yang telah ada semenjak awal kehidupan manusia di muka bumi ('Imarah, 1998:xii).

Pada tingkat kosmologis, al Quran menyatakan bahwa al Islam, yang berarti menerima dan patuh secara total kepada Allah dan aturan hukum yang telah ia berikan, merupakan agama jagad raya ('Imarah, 1998:xii):

Maka apakah mereka mencari dien yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah aslama segala apa yang dilangit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan (QS. Ali Imran, 3:83)

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami apakan sesuatu apapun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Rabbhah mereka dihimpunkan (QS. Al An'aam, 6:38).

Dari pengertian di atas jelas tidak ada keterluangan islam di dalam setiap aspek kehidupan, kecuali pasti telah terjadi pembangkangan terhadap ketentuan Allah. Dengan begitu tidaklah mengherankan apabila seorang dan bahkan sudah seharusnya setiap muslim membicarakan segala sesuatu dalam terma-terma ... islam! Ketika demokrasi dan pluralisme mejadi imperatif

semestinya bukanlah demikian pula yang harus terjadi dengan kehasan? Bukankah politik hanya sebuah ruang di mana pemikiran-pemikiran dikompetisikan secara persuasif untuk membentuk wacana publik dan mendapat dukungan dari mereka, dengan harapan pada akhirnya menjadi mungkin untuk diimplementasikan sebagai *vox populi vox dei*?

Sebagai catatan akhir dari Subbab ini, ada baiknya kita ketahui bahwa di dalam bahasa sansekerta istilah agama memiliki arti spesifik peraturan timbal balik antara raja dan kawula. Dsamping istilah agama adalah istilah ugama, yang berarti peraturan berlaku antara sesama manusia, dan igama yang berarti peraturan timbal balik antara dewa dan manusia (Parmoedya, 2000). Apabila ad dienu Islam toh tetap harus diartikan sebagai agama Islam, kini tentu saja kita mengerti apa konsekuensinya.

DEFINISI EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu umumnya didefinisikan sebagai : Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mendayagunakan sumberdaya- sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas baik untuk masa kini ataupun masa mendatang dengan dipandu oleh nilai-nilai Islam (lihat Mannan, 1980:4).

Untuk definisi di atas keberatan umumnya diajukan pada kriteria "terbatas" untuk sumberdaya dan "tidak terbatas" untuk kebutuhan. Ditinjau dari rasionalitas ekonomi barangkali keberatan ini sah, tetapi dari

kacamata rasionalitas Islam dengan sendirinya tertolak. Kebutuhan dalam Islam adalah dibatasi (tetapi tidak sampai pada tingkat "terbatas" dalam pengertian konvensional) oleh kendala sosial dan moral. Sementara meskipun dilihat dari sudut pandang "Allah sebagai Rabb", sumberdaya-sumberdaya adalah tidak terbatas, tetapi toh dalam tataran "manusia" ia harus bekerja" untuk bisa memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya tersebut, dan dengan demikian tetap berlaku opportunity cost dalam upaya mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya tersebut.

Mengingat bahwa aspek ekonomi hanya merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan, barangkali lebih tepat apabila ekonomi Islam sebagai ilmu didefinisikan sebagai: *"Ilmu yang mempelajari metode atau cara-cara menjelaskan perintah-perintah dan larangan-larangan Islam dalam kegiatan ekonomi melalui "bahasa" yang biasa digunakan dalam disiplin ekonomi"*. Tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu ini bisa melihat secara gamlang bahwa Islam adalah merupakan solusi untuk menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia.

Struktur Ilmu Ekonomi

Kurang disadari bahwa Ilmu Sosial selalu berangkat dari nilai-nilai tertentu baik pada tataran Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis, Pengetahuan pada ketiga tataran itulah yang kemudian menjadi dasar dari ide-ide di bidang ilmu sosial. Tidak mengherankan para Marxist biasa menyatakan bahwa "all social sciences

are ideologies in disguise" (lihat Capra, 1983 : 190). Jadi sebenarnya tidak ada ilmu sosial yang bebas nilai.

Dalam ilmu ekonomis kapitalis pengetahuan pada ketiga tataran di ataslah yang sebenarnya melandasi diasumsikannya sosok "manusia ekonomi" yang rasional dalam artian mementingkan diri sendiri melalui perilaku memaksimalkan kepuasan atau keuntungannya. Sumber kepuasan "manusia ekonomi" ini adalah benda-benda atau materi. "Manusia ekonomi" dengan demikian adalah individualis dan suka memiliki. Ilmu ekonomi dengan demikian adalah individualis dan suka memiliki. Ilmu ekonomi kapitalis pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menjelaskan bagaimana perilaku "manusia ekonomi" ini dalam menyelesaikan masalah dasar ekonomi, *what, how dan for whom*.

Dengan analogi ilmu ekonomi Islam dengan demikian juga harus mulai dengan menghadirkan sosok "manusia islam", selanjutnya sebagian besar dari bahasan ilmu ekonomi tentu saja adalah menjelaskan perilaku "manusia islam" ini dalam menyelesaikan masalah dasar ekonomi. *What, how dan for whom*, dengan perangkat-perangkat yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi konvensional. Tentu saja dengan tetap menyadari keterbatasan perangkat-perangkat tersebut, terutama berkenaan dengan masalah keterjebakan ilmu ekonomi konvensional dalam mengagung-agungkan penggunaan paradigma Newtonian dan Cartesian.

Urgensi Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi konvensional pada dasarnya berkembang dari proses *trial and error* dalam laboratorium kehidupan. Pada Adam Smith pembahasan lebih di titik beratkan pada penanaman ide-ide bagi terbentuknya "manusia-manusia ekonomi" dan sebuah masyarakat yang bersedia membangunkan interaksinya dengan pola perilaku "manusia ekonomi". Dari interaksi awal inilah kemudian timbul "tantangan-tantangan" yang merangsang munculnya respon-respon ilmiah, yang kodifikasinya melahirkan apa yang kita kenal sebagai ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional dengan demikian berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat kapitalis.

Ilmu Ekonomi Islam saat ini tidak mengalami perkembangan seperti yang dialami oleh ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi islam telah kehilangan laboratoriumnya, sehingga ilmu ekonomi berdasarkan praktek historis yang pernah ada kemudian dicoba dibangun model-model perilaku ekonomi dari "manusia islam". Kondisi ini tentu saja seiring memajukan pertanyaan, "benarkah yang demikian itu adalah ekonomi Islam untuk zaman modern ini." Jawaban terhadap pertanyaan ini sering melahirkan dua sikap ekstrem, yakni dogmatisme atau penolakan sama sekali bahwa islam memiliki sebuah sistem ekonomi.

Sub bahasan ini tidaklah bermaksud untuk meremehkan karya para pakar ilmu ekonomi Islam. Maksud utamanya adalah perhatian, bahwa aspek terpenting dari pengembangan

ilmu ekonomi islam pada dasarnya adalah bagaimana merealisasikan terbentuknya "manusia-manusia islami" yang siap berinteraksi secara murni berdasarkan nilai-nilai moral dan etis yang dituntunkan islam. Dari sinilah sebenarnya sistem perekonomian islami justru bisa berbentuk secara utuh, tentu saja melalui proses *trial and error* dalam praktek.

Kita coba renungi pemikiran yang lahir dari pengalaman Dr. Waqar Masood Khan (1985:17-18) sebagai berikut :

"Kedua, setelah penyelesaian serial panjang tentang ukuran-ukuran yang dikemukakan untuk menghapuskan Riba dari sektor finansial di Pakistan, seseorang menjadi terhinggapi oleh sebuah rasa frustrasi terhadap keseluruhan sistem. Saya telah mengamati secara amat dekat upaya-upaya islamisasi. Tanpa melebih-lebihkan harus dikatakan bahwa keseluruhan upaya-upaya tersebut telah menghasilkan hanya perubahan-perubahan dalam terminologi saja, bahkan tanpa meletakkan dasar-dasar bagi sistem finansial islami. Dalam lima tahun terakhir, tidak terdapat satupun eksperimen pengaturan finansial islami yang sebenarnya.

Pengalaman Pakistan walau demikian adalah sangat berguna bagi generasi berikutnya. Satu manfaat dari upaya-upaya islamisasi yang dilakukan tersebut adalah kesadaran yang meluas bahwa sebuah perubahan yang menyeluruh seperti implementasi sistem finansial

islam tidak bisa dilakukan melalui legislasi. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa mayoritas kaum muslimin yang terlibat dengan semangat islam. Kemajuan yang nyata akan harus muncul dari suatu perubahan sikap dari mereka yang sangat terlibat dalam sistem konvensional.

Argumentasi saya adalah bahwa upaya-upaya islamisasi yang terisolasi adalah sangat tidak menjanjikan. Ideologi islam adalah pervasive dan karenanya Islamisasi harus berproses secara seimbang, tidak hanya merambah legislasi tetapi juga merombak pikiran kaum muslimin."

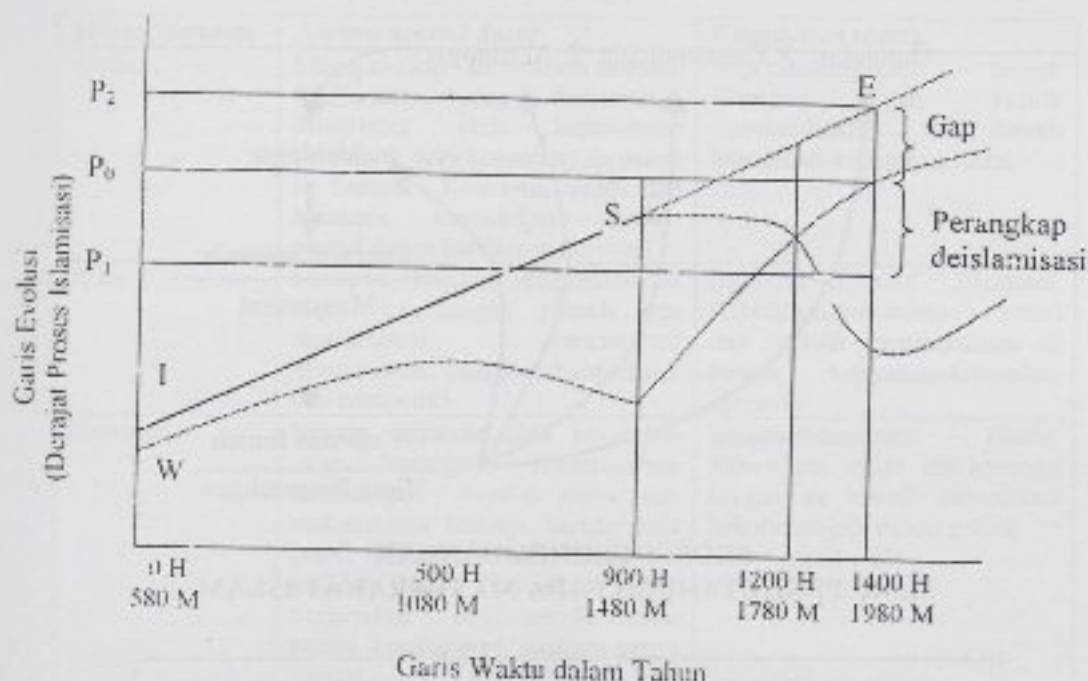
KESIMPULAN

Uraian di atas hanya dimaksudkan untuk memberikan pengantar yang sangat singkat mengenai paradigma ekonomi islam, terutama berkenaan dengan masalah mengapa harus ekonomi Islam. Keharusan ini pada dasarnya muncul dari pengertian istilah *ad dienul islam*. Di samping itu dicoba digarisbawahi point terpenting dari pengembangan ilmu ekonomi islam, yakni pembentukan masyarakat islami – suatu masyarakat yang anggotanya adalah "manusia-manusia islam" yang bersedia berinteraksi dengan cara-cara yang islami. Tanpa masyarakat ini proses islamisasi seutuhnya adalah musykil terjadi. Untuk lebih mendapatkan gambaran mengenai paradigma ekonomi islam dapat dilihat skema-skema pada lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Imarah, Muhammad, (1998), *Perang Terminologi: Islam Versus Barat*, Pent. Musthalah Maufur, Jakarta: Rabbani Press.
- Capra, Eritjof, (1983), *The Turning Point : Science, Society and The Rising Culture*, New York: Bantam Books.
- Geraudy, Roger, (1980), *Janji-janji Islam*, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khan, Waqar Masood, (1985), *Toward and Interst Free Islamic Economic System*, London: The Islamic Foundation.
- Mannan, M.A., (1984), *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*, Arab Saudi: Internasional Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.
- Pramoedya Ananta Tour, (2000), *Arok Dedes*, Jakarta: Hasta Mitra.

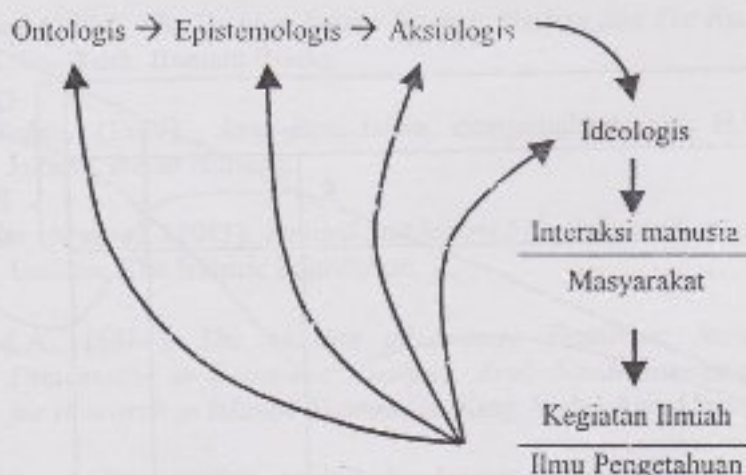
PROSES PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM DAN PERADABAN BARAT



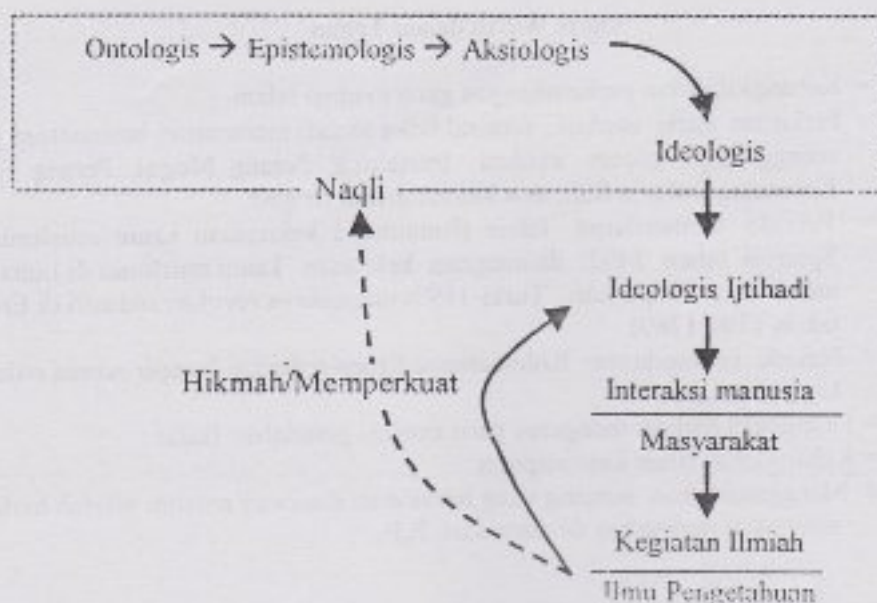
- IS = Kebangkitan dan perkembangan garis evolusi Islam
- SE = Perkiraan garis evolusi, semisal tidak terjadi momentum-momentum yang mengganggu proses evolusi (misalnya: Perang Mogol, Perang Salib, Kesesatan Doktrin Sufi, dan Kolonialisme Eropa)
- SD = Periode kemunduran Islam (Runtuhnya kekuasaan kaum muslimin di Spanyol tahun 1492; disintegrasi kekuasaan kaum muslimin di India dan munculnya Emperium Turki-1699; munculnya revolusi industri di Eropa, tahun 1700-1760).
- DC = Periode kemunduran: Kolonialisme Eropa terhadap hampir semua wilayah kaum muslimin.
- WKDG = Pandangan tentatif mengenai garis evolusi peradaban Barat
- CR = Kebangkitan Islam kontemporer
- P_0P_1 = Menggambarkan senjang yang harus diisi ilmuwan muslim setelah berhasil mengatasi perangkap deislamisasi, P_0P_1 .

Lampiran 2

**PROSES PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT
KONVENSIONAL**



**PROSES PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT ISLAM**



**ASUMSI-ASUMSI DASAR
OPERASIONAL SISTEM EKONOMI**

Sistem Ekonomi	Asumsi-asumsi dasar	Kepedulian utama
Tradisi	Mensyaratkan keberadaan manusia tradisional yang diasumsikan dimotivasi oleh kepentingan kelompok atau komunitas darimana ia berasal. Konvensi, tradisi dan kebiasaan memainkan peranan positif dalam kehidupan ekonomi	Imperatif-imperatif Sosial; Ekonomi dan Politik ter subordinasi di bawah kebutuhan-kebutuhan sosial.
Pasar	Manusia ekonomi yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan maksimisasi keuntungan; diasumsikan sangat individualistik dan kompetitif.	Imperatif-imperatif Ekonomi; Kebutuhan-kebutuhan sosial dan politik ter subordinasi di bawah kebutuhan-kebutuhan ekonomi.
Komando	Negara, dipandu oleh keyakinan akan kurangnya keharmonisan kepentingan, konflik kelas, dan materialisme historis, berada pada posisi terbaik untuk mengetahui pilihan dan kebijakan yang bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan maupun secara parsial.	Imperatif-imperatif Politis; Kebutuhan sosial dan ekonomi berada di bawah subordinasi kebutuhan-kebutuhan politik
Islam	Mensyaratkan keberadaan manusia islam; Evolusi kesadaran islam dan pewujudan yang konsekuen pada relasi produksi islami. Manusia islam diasumsikan sebagai pemaksimalisasi ekonomi; dengan kendala etik dan moral dari syaria'ah; dianggap sebagai individualis, kooperatif dan bertanggung jawab secara sosial.	Etika dan Moral; Kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial dan politik yang terpadu berada dalam subordinasi imperatif keyakinan dan moralitas.

Sumber : *Murman (1984)*

SEMBILAN ASUMSI-ASUMSI DASAR ILMU EKONOMI ISLAM

- (a) Keyakinan terhadap <<manusia islami>> sebagai lawan dari "manusia ekonomi"
- (b) Kekurang harmonisan kepentingan
- (c) Kepemilikan relatif atas kekayaan pribadi
 - Penggunaan berkelanjutan atas kekayaan;
 - Zakat atas semua kekayaan yang dimiliki;
 - Penggunaan yang bersifat atas kekayaan;
 - Penggunaan kekayaan tanpa merugikan pihak lain;
 - Kekayaan diperoleh secara halal;
 - Penggunaan kekayaan secara tidak boros ataupun kikir;
 - Penggunaan kekayaan secara bermanfaat bagi kesejahteraan pemiliknya;
 - Pelaksanaan secara benar hukum waris islam.
- (d) Ketidakpercayaan terhadap materialisme historis
- (e) Ketidakpercayaan terhadap kedaulatan konsumen dan produsen
- (f) Peranan negara yang terbatas
- (g) Penekanan terhadap sejarah dan yang diluar sejarah
- (h) Penekanan pada perubahan evolusioner dan struktur
- (i) Keluwesan dan kekakuan bawaan dalam hukum (Mannan, 1984).

SEMBILAN POSTULAT PERILAKU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

- (a) Postulat Integrasi Ekonomi Secara Total bukan Isolasi.
- (b) Postulat Keamanan-ekonomi bukan Kepemilikan absolut.
- (c) Postulat kerja sama secara sadar bukan kompetisi dan kebebasan yang tidak terbatas.
- (d) Postulat Dua Dimensi Hasil (*Return*) dan Pertanggungjawaban (*Accountability*);
- (e) Postulat <<Penyediaan Kebutuhan Minimal>>
- (f) Postulat Kepemilikan Pribadi yang terbatas Atas kekayaan;
- (g) Postulat Kepemilikan Publik yang terbatas;
- (h) Postulat Penggunaan Maksimal melalui Sosialisasi Alat-alat Produksi;
- (i) Postulat Risiko dan Ketidakpastian (Mannan, 1984).

FASE-FASE PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM

FASE PERTAMA : Selama pertengahan tahun 30-an, beberapa ulama yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal bidang ekonomi namun memiliki pandangan jernih terhadap problema sosial ekonomi pada masa itu dan pendekatan islam terhadapnya – melibatkan diri ke dalam subyek ini. Mereka membawa suatu pendekatan yang segar terhadap persoalan tersebut. Berbeda dengan para modernis dan apalogis, yang umumnya berupaya merubah ajaran islam agar sesuai dengan praktek yang berjalan, para ulama ini secara berani justru menegaskan kembali posisi ajaran islam dan bankir muslim: untuk berjuang merombak tatanan ekonomi yang ada agar selaras dengan prinsip dan norma islam. Beberapa ekonom dan bankir muslim memenuhi ajakan tersebut akan tetapi upaya mereka masih bersifat elementer dan memiliki pengaruh yang terbatas. Namun demikian sebuah awal baru telah dimulai.

FASE KEDUA Awal ini membawa kepada fase kedua yang didalamnya, selama 20 tahun terakhir, para ekonom muslim berjuang lebih keras lagi untuk mengembangkan beberapa aspek tertentu dari sistem moneter islam. Suatu analisis ekonomi tentang alasan pelarangan riba dalam islam diketengahkan dan kerangka pokok dari suatu sistem perbankan dan keuangan alternatif yang nir riba dirancang. Sumbangan berarti di bidang ini dibuat di konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam yang diadakan di Makkah tahun 1976, Konferensi Internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional baru di London tahun 1977, dua seminar tentang Ilmu Ekonomi Fiskal dan Moneter Islam di Makkah (1978) Islamabad (1981), Konferensi tentang Perbankan Islam dan Strategi Kerjasama Ekonomi di Baden-Baden Jerman barat (1983). Lebih dari selusin buku-buku dan monograph telah diterbitkan berisi makalah-makalah dan pembahasan yang muncul dalam berbagai konferensi dan seminar tersebut. Barangkali sumbangan intelektual cum-operasional yang paling penting adalah dari Pakistan's Islamic Ideology yang berdasarkan sebuah laporan dari Panel Ekonomi dan Bankirnya, telah menghasilkan cetak biru pertama penghapusan riba dari perekonomian modern yang komprehensif dan sistematis. Menurut pendapat para penulis masa kini, laporan tersebut menggambarkan nilai tinggi dari sumbangan kontemporer kaum muslimin terhadap pengembangan suatu model perekonomian nir riba. Laporan tersebut juga merupakan puncak dari karya orisinal yang dilkakukan oleh para ekonom muslim dalam periode ini.

FASE KETIGA : Perkembangan yang setara selama dekade terakhir menandai fase ke tiga dan berisi usaha-usaha untuk mengembangkan institusi keuangan dan perbankan nir riba baik di sektor publik ataupun swasta. Pada fase ini tigapuluh delapan bank dan institusi keuangan dan investasi telah beroperasi atas basis nir riba di tiga benua: Asia, Afrika dan Eropa. Sekurangnya dua dari institusi ini, yakni Islamic Development Bank

di jeddah dan Darul Mal al-Islami di Bahamas dan Geneva, beroperasi secara multi nasional. Meskipun berumur sangat muda dan masih panjang jalan yang mesti ditempuh. Institusi-institusi merupakan bukti nyata dari Teori Keuangan Islam

FASE KEEMPAT : Ekonomi moneter Islam saat ini sedang memasuki fase keempat yang menuntut pendekatan yang lebih integral dan kritis terhadap keseluruhan teori dan praktek perbankan dan keuangan islam. Para pioner telah membuka jalan, kini saatnya untuk melakukan penyempurnaan dan pencanggilan. Para ekonom menghadapi tugas yang menantang untuk mengevaluasi keseluruhan situasi paling tidak di tiga wilayah.

Pertama, menggabungkan karya berbagai ekonom ke dalam suatu pandangan yang komprehensif tentang sistem moneter islam secara utuh, dan menghindari konsentrasi pada elemen uang dan bank yang bersifat khusus dan kadang saling terpisah. Sudah saatnya untuk membedakan mana yang pokok dan mana yang cabang.

Kedua, untuk mengevaluasi kembali secara kritis berbagai model perbankan islam yang telah dikembangkan selama tahun-tahun sebelumnya di dalam konteks praktek perbankan islam dengan suatu pandangan untuk menyempurnakan teori maupun praktek. Kini saatnya untuk menguji teori dan untuk memeriksa dan mengevaluasi institusi-institusi yang muncul dengan "batu ujian" tujuan-tujuan dari perbankan dan sistem keuangan islam.

Ketiga, adalah sangat penting untuk meletakkan keseluruhan teori dan praktek perbankan islam di dalam perspektif sebuah perekonomian islam dan tatanan moral dan sosial islam. Suatu elemen sistem islam, bagaimanapun pentingnya, tidak dapat menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan, bila dibiarkan beroperasi secara terisolasi. Elemen-elemen ini harus disertai pula dengan perubahan-perubahan yang bersifat komplementer untuk menuntaskan prosesnya. Penghapusan riba hanya merupakan satu aspek dari program ekonomi islam. Ini harus disertai dengan, dan diperluas dengan perubahan-perubahan lain baik yang bersifat memotivasi ataupun bersifat struktural. Perbankan Islam hanyalah merupakan suatu bagian dari proses, dan tidak dimaksudkan sebagai keseluruhan atau akhir dari keseluruhan proses.

(Sumber: Pengantar Khurshid Ahmad untuk buku Chapra, Umer M., 1985, *Towards a Just Monetary: A Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings*, London: Islamic Foundation, hal. 9-11)